

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kota-kota di Indonesia pada umumnya memiliki persoalan dengan ruang publik, seperti persoalan parkir yang memakan tempat berlebihan ataupun memakan bahu jalan, masalah menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL), kemacetan lalu lintas, papan reklame yang berserakan, dan penggunaan ruang publik yang kumuh. Persoalan-persoalan tersebut sejak awal Orde Baru hingga sekarang era reformasi, belum terselesaikan dengan baik, bahkan persoalannya semakin menjadi-jadi.

Berbagai kebijakan dan strategi yang diambil oleh para *stakeholder* dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan kota, khususnya yang menyangkut tata ruang kota, justru menimbulkan permasalahan baru, kurang mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat kota khususnya mereka yang menjadi korban kebijakan tersebut. Contoh kasus dari permasalahan ini misalnya penertiban pedagang kaki lima yang ada di Kota Bandar Lampung (Pasar Bambu Kuning), penertiban ini justru mendapat perlawanan dari para pedagang. Contoh lainnya adalah rencana relokasi pemukiman penduduk di sepanjang wilayah pesisir Kota Bandar Lampung sehubungan dengan adanya kebijakan *Water Front City* dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kebijakan tersebut justru kurang mendapat sambutan yang baik dari penduduk yang ada di sepanjang wilayah pesisir Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung adalah salah satu kota terbesar ketiga yang ada di pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang. Tetapi sebagaimana kota-kota besar di Indonesia lainnya, Kota Bandar Lampung kerap dihiasi oleh wajah-wajah hitam khas perkotaan seperti pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, pengemis dan anak jalanan, serta aksi-aksi penggusuran dan penertiban pedagang kaki lima.

Hal yang menarik untuk diamati dan analisis adalah kehadiran pasar-pasar modern seperti *mall* dan *swalayan* di Kota Bandar Lampung yang sebenarnya menjadi ancaman bagi keberadaan pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung itu sendiri. Kehadiran pasar-pasar modern oleh sebagian orang memang dianggap sebagai kemajuan dalam bidang perekonomian. Tetapi di sisi lain kehadirannya justru akan membunuh para pedagang sektor informal hal ini dikarenakan *mall* atau *swalayan* mempunyai nilai lebih seperti kebersihan, kenyamanan, bahkan jika seseorang belanja ke *mall* dan *swalayan* seakan menjadi penanda status social seseorang yang tinggi dalam masyarakat. keadaan sebaliknya jika kita melihat pasar-pasar tradisional yang khususnya secara kebersihan, keindahan, dan kenyamanan memang belum tertata sehingga terkesan menimbulkan kesan jorok dan kampungan.

Salah satu sektor informal yang sering dianggap sebagai perusak keindahan kota dan penyebab kemacetan lalu lintas adalah pedagang kaki lima. Ibarat benalu dalam konotasi positif, pedagang kaki lima akan selalu hidup dalam situasi pasar apa pun. Pedagang kaki lima akan selalu tumbuh pada setiap tempat transaksi jual-beli. Jika diibaratkan pedagang kaki lima seperti rumput, bayangkan rumput

yang tiba-tiba tumbuh justru di dalam pot bunga walaupun tidak kita tanam sebelumnya. Cobalah cermati sebuah pot berisi bunga di halaman rumah, jika tidak kita urus maka akan tumbuh rumput-rumput yang lainnya.

Begitu pula pedagang kaki lima, mereka akan segera tumbuh sepanjang kita menyebut pasar. Jadi pasar dan pedagang kaki lima atau sebaliknya pedagang kaki lima dan pasar tidak bisa kita pisahkan satu sama lainnya. Hanya saja, jelas ada perbedaannya. Jika pedagang kaki lima adalah para pedagang yang bermodal tidak besar yang kemudian kita golongkan sebagai pedagang ilegal karena tak punya toko (kios). Sedangkan pedagang legal adalah pengusaha yang memiliki kios, *counter*, atau toko dengan modal melebihi yang dipunyai pedagang kaki lima. Berbeda dengan pedagang kaki lima, pedagang legal dikenai sewa pertahun dan ditarik pajak usahanya.

Oleh sebab itu, pedagang legal cenderung "dimanjakan" oleh penguasa dalam hal ini pemerintah. Karena dapat membantu pembangunan. Biasanya pula pedagang legal lebih tertib, bersih, dan dianggap selalu bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan. Sementara pedagang kaki lima kebalikannya: ditengarai kerap menciptakan keruwetan, kesemerawutan, kesumpekan, dan kemacetan di sekitaran pasar.

Layaknya rumput di dalam pot, pedagang kaki lima harus dicabut hingga ke akarnya. Hak hidup pedagang kaki lima pada akhirnya sama dengan rumput di dalam pot, tidak diperkenankan. Kalau pun memaksakan diri untuk hidup, dengan cara kekerasan pun dilakukan demi ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keindahan kota.

Pikiran dan pendapat seperti itulah, boleh jadi, yang memicu Pemerintah kota Bandarlampung untuk memperindah kotanya dengan cara menyapu bersih pedagang kaki lima. Pemerintah kota Bandar Lampung tidak ada cara lain dalam menghadapi persoalan pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning, melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2000 dan ditambah Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1999 tentang pedagang kaki lima.

Memang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 8 Tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Berikut ini pasal yang mengatur tentang ketertiban umum yang menyangkut masalah keberadaan pedagang kaki lima. Perda Nomor 8 tahun 2000 pada bab III tentang larangan mempergunakan fasilitas umum, Pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 tertulis jelas:

1. Mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan atau bangunan yang menghadap pada jalan umum oleh pedagang kaki lima atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan atau ditunjuk oleh walikota.
2. Mempergunakan pasar atau bangunan kompleks pertokoan yang tidak bertingkat atau lantai 1 (satu) sebagai tempat bermukim.
3. Mempergunakan halaman parkir pada kompleks pasar/pertokoan/plaza untuk tempat mirip atau menetap kendaraan atau gerobak dagangan.

Peraturan daerah inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bagi pemerintah kota Bandar Lampung untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima di lingkungan pasar maupun trotoar-trotoar jalan. Konsentrasi pengawasan dan tindakan penertiban oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu, mengarah pada wilayah Pasar Bambu Kuning, Pasar Baru/Smep, Pasar Gintung, Pasar Tugu, dan Pasar Panjang. Konsentrasi penertiban ditujukan pada wilayah ini karena jumlah pedagang yang banyak dan keberadaannya mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung kerap kali diwarnai kericuhan. Bahkan barang dagangan dan tempat berjualan pedagang kaki lima seperti meja dan gerobak dibawa dan disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Walaupun para pedagang kaki lima telah ditertibkan, namun kenyataan menunjukkan bahwa setelah mereka ditertibkan pada keesokan harinya mereka masih bisa berjualan. Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang kaki lima tetap eksis dan *survive* di tengah ancaman penertiban dari Pemkot Bandar Lampung. Dengan tetap membuka lapak atau tetap berjualan maka secara tidak sadar para pedagang kaki lima telah melakukan perlawanan. Karena mereka tidak taat dan patuh terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap oleh para pedagang kaki lima bahwa kebijakan tersebut hanya merugikan mereka.

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti melalui media cetak seperti koran, majalah ataupun tabloid, penertiban pedagang kaki lima yang terbesar terjadi pada tanggal 30 Oktober 2007. Jumlah pedagang kaki lima Pasar Bambu Kuning yang ditertibkan pada akhir Oktober tersebut yaitu 686 pedagang yang dalam setiap harinya memiliki omzet 500 ribu/hari (Lampung post, 18 Oktober 2008)

Ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh pedagang kaki lima terjadi akibat adanya peran dominan dan perampasan hak-hak dasar sebagai manusia dari rezim berkuasa. Para penguasa melakukan semua ini melalui sebuah institusi yaitu Negara. Dalam konteks ini, negara yang sedang kita analisis adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan pekerjaan yang layak kepada warga negara. Selain itu, seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sudah selayaknya negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan perlindungan, penghidupan yang layak serta menegakan keadilan sosial untuk masyarakatnya khususnya para pedagang kaki lima.

Penggusuran dan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku penguasa, telah melakukan dan melucuti hak-hak azasi para pedagang kaki lima. Instrument yang mereka gunakan tidak lain adalah kebijakan dan aturan-aturan yang merugikan pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima dianggap sebagai sesuatu yang illegal dan melanggar hukum. Sehingga keberadaanya harus ditertibkan.

Kasus yang membelunggu antara Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku penguasa dan mereka yang dikuasai yaitu pedagang kaki lima pada akhirnya melahirkan kelompok kepentingan, khususnya diantara sesama pedagang kaki lima. Individu-individu (dalam hal ini pedagang kaki lima) yang merasa memiliki kepentingan sama, mereka meleburkan diri menjadi satu dalam sebuah wadah organisasi. Tujuannya tidak lain untuk melindungi hak-hak para pedagang kaki lima, serta sebagai perisai atau benteng perlawanan terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dari uraian-uraian di atas, penting untuk kita analisis secara lebih mendalam bahwa tanpa disadari para pedagang kaki lima telah melakukan sebuah gerakan sosial (*social movement*). Memang gerakan sosial pedagang kaki lima tidak seperti Komunie Paris 1871 yang begitu ekstrim, atau seperti gerakan *apartheid* di Afrika Selatan, dan tidak pula seperti gerakan reformasi 1998 yang berhasil menggulingkan sang penguasa (Orde Baru). Tetapi gerakan sosial pedagang kaki lima yang tidak hanya berkutat dalam masalah ekonomi, tetapi gerakan sosial pedagang kaki lima ini telah masuk ke dalam ranah kekuasaan.

Perlawanan pedagang kaki lima terhadap penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiratkan sebuah pesan bahwa pedagang kaki lima pun memiliki kekuatan untuk melawan sang penguasa. Aksi-aksi protes atau demonstrasi, tetap berjulan di tengah ancaman penertiban dan penggusuran, serta para pedagang kaki lima melebur menjadi satu ke dalam sebuah wadah organisasi menjadi tanda bahwa mereka yang dinamakan pedagang kaki lima mempunyai kekuasaan yaitu kekuasaan untuk melakukan perlawanan

baik secara terbuka maupun secara laten. Hal-hal tersebut menggambarkan bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) telah melakukan gerakan sosial (*social movement*). Di sinilah penting untuk diteliti mengenai “Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Konflik Marxisme”.

Perspektif konflik Marxisme yang digunakan dalam studi ini dikarenakan studi marxisme lebih menempatkan pengalaman pelaku-pelaku manusia di pusat analisis adalah berkenaan dengan konsep kelas yang hadir dalam masyarakat itu sendiri (Scott, 2000). Sehingga bagi peneliti ada sebuah relevansi jika studi ini dilakukan melalui pendekatan dan analisis konflik marxisme karena apa yang dilakukan oleh pedagang kaki lima merupakan yang peneliti anggap sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap kelas berkuasa yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian-uraian yang telah peneliti paparkan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gerakan sosial Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif konflik marxisme?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis gerakan sosial yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung yang ditinjau dari perspektif konflik marxisme.
2. Menganalisis *power* dan *powerless* di antara negara, *local government* (Pemerintah Kota Bandar Lampung), dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan perbendaharaan kajian-kajian sosiologis teraktual dan kontemporer. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan dengan gerakan sosial (*social movement*).

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, penelitian ini dirasakan sangat berguna bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian terhadap nasib para Pedagang Kaki Lima (PKL).

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Negara**

#### **1. Definisi Negara**

Menurut Supomo negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala masyarakat organis, yang terpenting dalam negara berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya (Nasution, 2004). Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.

Harold J. Laski mengemukakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu (Budiardjo, 2000).

Menurut Robert M. MacIver negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (Budiardjo, 2000).

Negara secara eksplisit dipandang sebagai sebuah aparatus represif (Althusser, 2007). negara pada intinya merupakan apa yang disebut oleh para penganut Marxis klasik sebagai *aparatus Negara*. Istilah ini memiliki arti: bukan hanya aparatus yang memiliki bidang kerja yang spesialis, seperti polisi, pengadilan, penjara; namun juga tentara yang mengintervensi secara langsung karena posisinya sebagai kekuatan represif suplementer yang paling menentukan ketika polisi dan korps-korps bantuan yang spesialis 'tak mampu menguasai keadaan'. Di atas semua itu, juga ada kepala negara, pemerintah, dan birokrasi.

Sementara menurut Marx-Engels, negara ada justru diakibatkan oleh adanya ketidaksesuaian pada masyarakat yang sifatnya mendasar (Arif, 2003). Marx memandang bahwa kondisi material masyarakat sebagai basis dari struktur dan kesadaran manusia. Dengan demikian, bentuk negara dimunculkan dari pola-pola hubungan produksi (ekonomisme); bukan pada asumsi bahwa masyarakat ingin hidup bersama. Marx meletakkan negara dalam konteks historis, yang kemudian menjadi terkenal dengan konsep materialisme-historis. Marx mengajukan ekspresi politik dari struktur kelas secara ekonomis, sehingga Marx memandang bahwa negara adalah alat bagi kaum borjuis untuk bersikap represif.

Menurut Ernest Mandel (1992), negara merupakan sesuatu yang hanya dijadikan sebagai sebuah instrument untuk mendominasi kelas. Menurut Ernest Mandel penting untuk menekankan fakta bahwa masyarakat secara kolektif mengatur dirinya sendiri dalam batasan pengetahuan dan kemungkinannya. Frederick Engels mendefinisikan negara sebagai sebuah badan khusus orang-orang bersenjata. Tentu saja, negara memenuhi fungsi selain mempersenjatai kelas

penguasa. Tetapi, fungsi negara adalah pemaksaan yang dilakukan atas satu kelompok masyarakat terhadap masyarakat yang lainnya (Mandel, 1992).

Seperti yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli mengenai definisi Negara seperti yang dikemukakan oleh Harold J. Laski, Robert M. MacIver, Althusser, Ernest Mandel, dan Marx-Engels, peneliti menangkap ada kesamaan dalam hal pendefinisian negara yaitu bahwa negara memang bersifat memaksa. Namun bila kita mengkritisi secara lebih dalam lagi maka ayang disampaikan Marx-Engels, Althusser, dan Ernest Mandel maka Negara memang dipandang sebagai sebuah alat dari kelas berkuasa untuk melakukan penguasaan dominan terhadap kelas yang dikuasai. Hal ini tentu saja mempunyai relevansi jika dikorelasikan dengan kondisi kekinian bahwa negara hanya menjadi instrument dari kelas borjuis untuk melakukan penghisapan dan penindasan terhadap kaum yang lemah, contoh dari masalah ini adalah banyaknya para pengusaha yang masuk ke dalam partai politik. Lihat saja Partai Golkar, PDIP, Demokrat, PAN, PKS, dan lain sebagainya. Para pengusaha tersebut banyak yang menjadi elite partai bahkan menjadi ketua umum. Jabatan-jabatan strategis yang dimiliki pengusaha dalam sebuah partai politik jelas member peluang untuk semakin menindas kaum yang secara ekonomi, social, dan politik lemah bahkan sulit mendapatkan akses, penindasan yang dilakukan melalui berbagai kebijakan yang hanya menguntungkan kaum borjuis atau kalangan pengusaha saja.

Uraian-uraian yang peneliti ungkapkan melalui sebuah contoh memberikan gambaran bahwa negara memang merupakan sebuah alat dari kaum borjuis untuk menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang dilakukan oleh badan khusus (yang mempunyai kekuasaan dan wewenang) seperti kepala negara, polisi, tentara dan pengadilan (aparatus negara) dengan cara memaksa.

## **2. Sifat Negara**

Pada umumnya negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sikap mencakup semua (Budiardjo, 2000). Sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Sifat mencakup semua, semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Sifat-sifat yang telah dijelaskan di atas, telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, mulai dari sifat memaksa, memonopoli dan sifat mencakup semua. Jelas sudah bahwa negara dalam perspektif marxis hanya dijadikan sebagai sebuah alat untuk mendominasi kelas bawah.

### 3. Fungsi Negara

Setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu (Budiardjo, 2000), yaitu:

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai “stabilisator”.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
3. Pertahanan; hal ini diperlukakn untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat pertahanan.
4. Menegakan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung memang bertugas menjaga stabilitas, baik stabilitas ekonomi maupun politik. Tetapi semua itu harus diimbangi pula dengan program-program kerja yang mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pengusuran dan penertiban terhadap pedagang kaki lima dengan alasan para pedagang kaki lima melanggar Peraturan Daerah No 8 Tahun 2000 bukanlah alasan yang tepat. Para pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Bambu Kuning merupakan bagian dari masyarakat yang mengharapkan kesejahteraan dalam hidupnya. Maka sudah selayaknya bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya untuk menciptakan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya termasuk pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning.

## **B. Tinjauan Masyarakat**

Harold J. Laski mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama (Budiardjo, 2000). Menurut Karl Marx pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Tetapi, Marx sendiri tidak pernah menguraikan mengenai teori kelasnya. Memang tidak ada uraian-uraian mengenai teori kelas dalam tulisan-tulisan Marx. Mirip dengan filsafat pekerjaan, teori kelas bukanlah sebuah eksplisit, melainkan ia melatar belakangi uraian Marx tentang hukum perkembangan sejarah, tentang kapitalisme, dan tentang sosialisme. Yang pada akhirnya ketiga hal tersebut akan menjadi dasar dari lahirnya gerakan kaum buruh (proletariat) yaitu Komune Paris pada tahun 1871 dan selanjutnya menjadi referen dari berbagai macam gerakan sosial, politik dan ekonomi di seluruh dunia sesudahnya (Suseno, 1999).

Meskipun Marx sering berbicara tentang kelas sosial, namun ia tidak pernah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah “kelas”. Pada umumnya, mengikuti sebuah definisi termasyhur Lenin, “kelas sosial” dianggap sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Pernyataan ini pun belum tentu benar seratus persen. Begitu pula tidak jelas apakah “kelas” merupakan kenyataan selama seluruh sejarah. Apakah dalam semua kebudayaan pascaprimatif terdapat kelas sosial? Pertanyaan ini umumnya dibenarkan, terutama karena kalimat termasyhur pada permulaan Manifesto Komunis: “Sejarah semua masyarakat yang ada hingga sekarang ini adalah perjuangan kelas”. Tetapi dalam tulisan Marx terdapat juga

indikasi bahwa, bertentangan dengan hal itu, kelas sosial merupakan gejala khas masyarakat pascafeodal, sedangkan golongan sosial dalam masyarakat feodal dan kuno lebih tepat disebut “kasta”.

Masih menurut Marx, akan terlihat bahwa dalam setiap masyarakat terdapat kelas-kelas yang berkuasa dan dikuasai. Marx berbicara tentang kelas-kelas atas dan kelas-kelas bawah. Hal ini sesuai dengan apa yang jelaskan oleh Ralf Dahrendorf (Veeger, 1993), bahwa analisis masyarakat dengan memakai segi pandangan konflik, bertitik tolak dari kenyataan bahwa anggotanya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu orang yang berkuasa dan mereka yang dikuasai. Dualisme ini, yang termasuk struktur dan hakikat tiap-tiap kehidupan bersama, mengakibatkan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dan mungkin saling berlawanan. Pada gilirannya diferensiasi kepentingan dapat melahirkan kelompok-kelompok yang berbenturan.

Menurut Gramsci masyarakat sipil adalah masyarakat yang memiliki privasi, otonom serta terlepas dari proses produksi, yaitu semua organisasi yang membentuk masyarakat sipil dalam sebuah jaringan kerja dari praktek-praktek dan hubungan sosial yang kompleks, termasuk pemodal dan buruh (Arif, 2003). Harus dibedakan antara masyarakat sipil dengan aparat pembentuk negara karena mereka mempunyai monopoli dan bersifat koersif yang disebut sebagai masyarakat politik (negara). Dalam masyarakat sipil semua kepentingan dari semua kelompok muncul. Tidak hanya dalam perjuangan kelas, tetapi lebih dari itu juga memperjuangkan wilayah demokrasi dan kerakyatan. Tetapi, relasi antara masyarakat politik dan masyarakat sipil berhubungan secara signifikan, bahwa



masyarakat politik melakukan penindasan melalui tindakan koersifnya sebagai sarana hegemoni.

Beberapa hal yang kiranya perlu dikritisi dari definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli yaitu definisi yang diberikan oleh Harold J. Laski. Definisi yang diberikan oleh Laski memang menjadi fondasi penilaian bahwa suatu masyarakat itu hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kritik tentu saja ditujukan karena Laski seakan menyamakan semua manusia dalam masyarakat mulai dari anggota masyarakat yang terdiri hanya satu kelompok saja (tidak beraneka ragam), bahkan Laski menyamakan tujuan dari masyarakat tersebut dengan menganggap tujuan bersama. Laski mengabaikan bahwa tidak semua masyarakat itu homogen, khususnya untuk masyarakat perkotaan yang tentu saja bersifat heterogen baik dari segi social, ekonomi dan tujuan hidup.

Di lain pihak, Marx memberikan sebuah penjelasan mengenai masyarakat yang dinilainya bahwa dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang berkuasa dan dikuasai. Penjelasan ini kiranya diikuti oleh Dahrendorf yang menilai masyarakat dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu kelompok berkuasa dan kelompok yang dikuasai. Kedua kelompok ini tentu akan melahirkan benturan kepentingan. Uraian ini tentu bersifat kontra dengan uraian Laski yang menilai bahwa masyarakat mempunyai tujuan bersama. Peneliti cenderung mengikuti Marx dalam menjelaskan tentang masyarakat, fakta yang terjadi bahwa dalam masyarakat ada kelompok berkuasa dan dikuasai. Pedagang kaki lima sebagai kelompok yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku kelas berkuasa dalam ekonomi dan politik. Atas pertimbangan ini maka peneliti

memberikan sebuah definisi tersendiri bagi masyarakat yaitu bahwa masyarakat ada sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah yang di dalamnya ada kelas-kelas social (kelas berkuasa dan kelas dikuasai) yang mempunyai perbedaan dalam kepentingan serta cara-cara mencapai tujuan hidupnya.

### **C. Tinjauan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Dalam sejarahnya, pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak (<http://warawirigajebo.blogspot.com/2009/11/pedagang-kaki-lima-esemerawutan-kota.html>, diunduh tanggal 20 September 2010, jam 19.00). Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Namun Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Berbagai produk ditawarkan pedagang-pedagang ini baik berbentuk barang maupun jasa dengan bermodalkan keuletan dan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat kebanyakan di kota ini. Oleh karena itu, pada kenyataannya PKL sangatlah diperlukan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai tingkatan ekonomi menengah ke bawah.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki atau lazimnya disebut trotoar. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki (kaki = feet) (1 feet = 30.48 cm, maka 5 feet = 152,4 cm) atau sekitar satu setengah meter (<http://forum.kafegaul.com/showthread.php?t=221744>, diunduh tanggal 20 September 2010, jam 19.00).

Pedagang kaki lima merupakan kegiatan sektor informal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya.
2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan “liar”).
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian.
4. Pendapatan mereka rendah dan tak menentu.
5. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterkaitan dengan usaha-usaha yang lain.
6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
7. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.
8. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.

9. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukaan, perkreditan dan sebagainya. Sebagian saluran arus barang dan jasa, pedagang kaki lima merupakan mata rantai akhir sebelum mencapai konsumen dari satu mata rantai yang panjang dari sumber utamanya yaitu produsennya.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai pedagang kaki lima maka dapat diberikan gambaran bahwa kegiatan usaha perdagangan yang menampakan adanya ciri yang tidak teratur, kurang terorganisir dengan baik, bahkan terkesan liar, oleh sebab itu perlu kiranya mendapat perhatian yang lebih intensif dari pemerintah agar usaha pedagang kaki lima tersebut dapat berkembang dengan baik.

Berikut gambar-gambar yang menunjukkan bahwa pedagang kaki lima telah ada sejak masa kolonial Belanda, diantaranya:

Gambar 1. Pedagang kaki lima tempo dulu yang memakai gerobak



Sumber: ([http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result&cp=4](http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=4), diunduh tanggal 20 September 2010 jam 19.10)

Gambar 2. Pedagang kaki lima buah-buahan tempo dulu yang memakai keranjang



Sumber:  
([http://kitlv.pictura-dp.nl/?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result](http://kitlv.pictura-dp.nl/?option=com_memorix&Itemid=28&task=result), diunduh tanggal 20 September jam 19.00)

Gambar 3. Pedagang kaki lima tempo dulu yang menjual aneka kain



Sumber:

([http://kitlv.pictura-dp.nl/?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result](http://kitlv.pictura-dp.nl/?option=com_memorix&Itemid=28&task=result), diunduh tanggal 20 September jam 19.00)

Gambar 4. Pedagang kaki lima tempo dulu yang menjual makanan



Sumber:

([http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result&cp=2](http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=2), diunduh tanggal 20 September jam 19.10)

Gambar 5. Pedagang kaki lima yang menjual minuman



Sumber:

([http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result&cp=2](http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=2), diunduh tanggal 20 September jam 19.10)

Gambar 6. Pedagang kaki lima yang memakai keranjang



Sumber:

([http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result&cp=2](http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=2), diunduh tanggal 20 September jam 19.10)

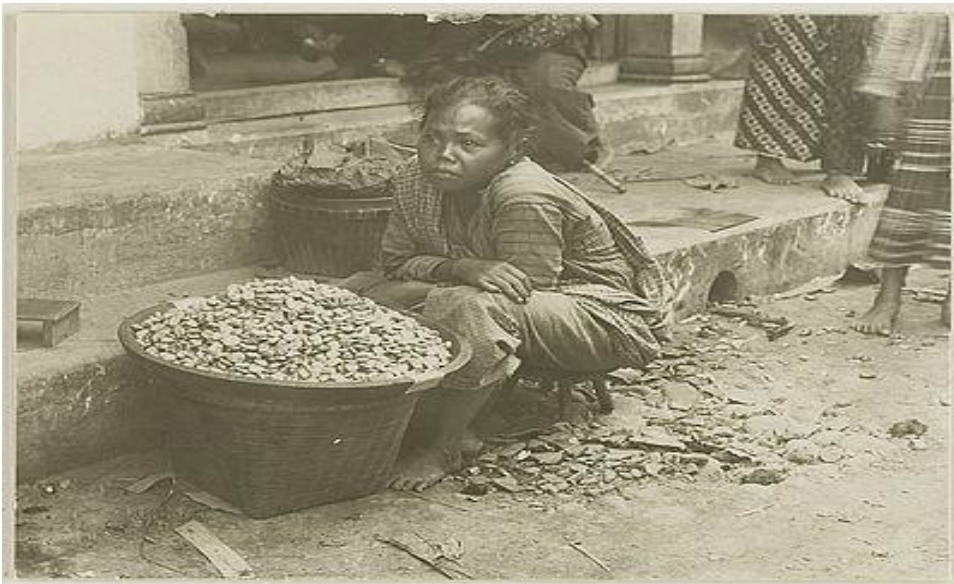
Gambar 7. Pedagang kaki lima yang memakai meja



Sumber:

([http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result&cp=3](http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=3), diunduh tanggal 20 September 2010 jam 19.15)

Gambar 8. Pedagang kaki lima yang berada di *emperan* toko



Sumber:([http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result&cp=4](http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=4), diunduh tanggal 20 September 2010 jam 19.10)



Gambar 9. Pedagang kaki lima yang berjualan di bawah pohon



Sumber:

([http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result&cp=5](http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=5), diunduh tanggal 20 September 2010, jam 19.15)

Gambar 10. Lapangan yang luas menjadi tempat pedagang kaki lima untuk berjualan



Sumber:

([http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result&cp=5](http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=5), diunduh tanggal 20 September 2010, jam 19.15)

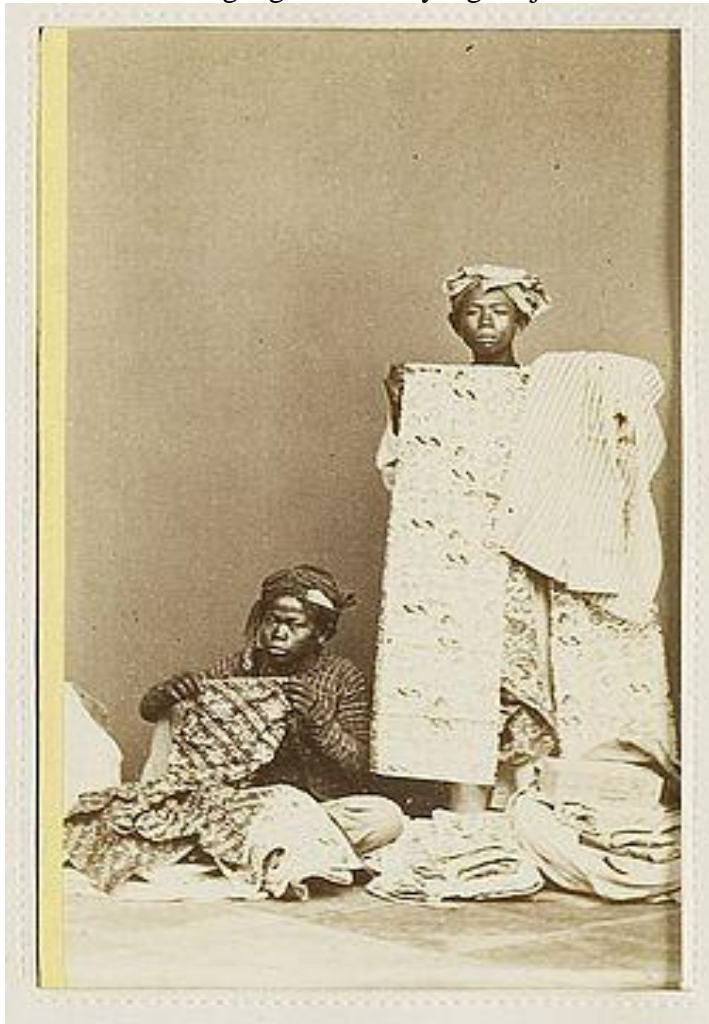
Gambar 11. Terlihat Pedagang kaki lima yang memakai keranjang yang terbuat dari anyaman pohon bambu



Sumber:

([http://kitlv.picturadp.nl/index.php?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result&cp=8](http://kitlv.picturadp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=8), diunduh tanggal 20 September 2010, jam 19.15)

Gambar 12. Pedagang kaki lima yang berjualan kain



Sumber:  
([http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result&cp=9](http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=9), diunduh tanggal 20 September 2010, jam 19.15)

Gambar 13. Pedagang kaki lima yang memakai meja



Sumber:

([http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com\\_memorix&Itemid=28&task=result&cp=9](http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&cp=9), diunduh tanggal 20 September 2010, jam 19.15)

#### D. Tinjauan Resistensi

Kalau kita mengacu pada kamus, kata melawan (*to resist*), memiliki pengertian yaitu mengusahakan sekuat tenaga untuk menahan, atau membalas kekuatan, atau efek dari (Scott, 2000)...Tapi kalau mengacu pada teks-teks studi perlawanan yang ada, kita akan segera berhadapan dengan gambaran yang lain, bahwa konsepsi melawan atau perlawanan tidak sesederhana dan sekering definisi yang ada di kamus. *Resistance* merupakan bentuk gerakan sosial yang lebih mengandalkan pola gerakan yang berbentuk spontan (Zaiyardam, 2002). Sikap radikal biasanya lebih dominan dalam gerakan *resistance*. Kelompok pendukung dari *resistance* adalah masyarakat bawah yang secara ekonomi lemah. *Resistance* adalah tindakan yang ditujukan untuk melawan dan menguasai hubungan kekuasaan yang tidak

selara, sebagai hal yang berbeda dari konsep otonomi relatif, yaitu pihak yang tidak berdaya biasanya menyingkir atau menghindari dari realitas penindasan (Saifuddin, 2005).

Dijalankannya kekuasaan dan kemungkinan resistensi terhadap kekuasaan itu membangun suatu dialektik kontrol dan otonomi, suatu keseimbangan kekuasaan yang membatasi tindakan para pelaku dalam hubungan mereka satu sama lain. Hubungan kekuasaan meliputi pula kemungkinan konflik karena pilihan ini di antara alternatif-alternatif, tetapi resistensi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk konflik atau pertentangan terbuka.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *resistance* merupakan suatu tindakan perlawanan yang berbentuk spontan dari kelas yang dikuasai terhadap kelas penguasa karena adanya hubungan kekuasaan yang tidak selara. *Resistance* dalam penelitian ini adalah segala macam bentuk perlawanan dari pedagang kaki lima terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung, baik perlawanan dalam bentuk demonstrasi, perlawanan terhadap pengusuran dan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan berbagai macam bentuk perlawanan lainnya yang ditujukan terhadap pemerintah yang berkuasa.

## **E. Tinjauan Gerakan Sosial**

### **1. Sejarah Gerakan Sosial**

Gerakan sosial (*social movement*) sesungguhnya merupakan gejala yang sudah ada sejak lama, namun baru beberapa abad yang silam, orang mulai sedikit memahami wataknya. Mirsel (2004) menjelaskan sejarah gerakan sosial yang dimulai pada abad ke-18 misalnya, gerakan Komunie Paris 1871 yang dipraktikkan oleh kaum buruh di Perancis berhasil menggulingkan para pemilik modal atau kaum borjuis, gerakan ini merupakan inspirasi dari lahirnya gerakan-gerakan perlawanan sesudahnya. Gerakan kaum buruh di Perancis tersebut sangat revolusioner. Selanjutnya ada gerakan Gereja Metodis di Amerika dan Inggris yang merupakan gerakan sosial yang berbasis agama. Pada abad ke-19, Gerakan Sosialis Internasional (*The International Socialist Movement*) yang tumbuh berkembang di berbagai tempat di Eropa juga dianggap sebagai gelombang gerakan sosial. Demikian halnya persoalan perbudakan membangkitkan gerakan sosial di Amerika yang membawa pada gerakan pembebasan budak. Pada abad ke-20 kita menyaksikan gerakan hak-hak sipil Eropa, hak sipil di Amerika untuk meruntuhkan sejarah panjang diskriminasi rasial di negeri itu. Di tahun 70-an gerakan antiperang dan gerakan antikemapanan yang menggoncang sendi kehidupan Amerika juga dikaji banyak orang sebagai inspirasi tentang gerakan sosial.

Umumnya gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Oleh karena gerakan sosial lebih dianggap memiliki orientasi pada perubahan, mereka dianggap mempunyai kesamaan tujuan, dan bukan karena kesamaan analisis.

Mereka umumnya dianggap tidak bekerja menurut prosedur baku, melainkan menerapkan struktur cair dan operasionalnya lebih diatur oleh standar yang muncul saat itu untuk mencapai tujuan jangka panjang (Zaiyardam, 2002). Mereka umumnya tidak dianggap memiliki kepemimpinan formal. Umumnya masa gerakan sosial ditentukan semata oleh keyakinan pribadi masing-masing terhadap tujuan gerakan. Sementara masa gerakan sosial, umumnya terikat dalam suatu identitas solidaritas kelompok yang tercermin dalam berbagai bentuk.

## **2. Definisi Gerakan Sosial**

Menurut Sztompka (2005) definisi gerakan sosial harus terdiri dari komponen berikut:

1. Kolektivitas orang yang bertindak bersama.
2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama.
3. Kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal.
4. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional.

Jadi gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka (Sztompka, 2005).

Penekanan serupa juga dikemukakan oleh para pakar sebagai berikut:

- a. Blumer mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan yang baru (Sztompka, 2005).
- b. Lang dan Lang mengemukakan bahwa gerakan sosial merupakan upaya kolektif untuk mengubah tatanan sosial (Sztompka, 2005).
- c. Smelser menjelaskan bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mengubah nilai dan norma (Sztompka, 2005).
- d. Turner dan Killian mendefinisikan gerakan sosial adalah tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi bagian masyarakat itu (Sztompka, 2005).

Gerakan sosial atau gerakan kemasyarakatan adalah seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga (*noninstitutionalised*) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat (Mirsal, 2004).



Pemberian definisi gerakan sosial oleh Sztompka dan Mirel perlu dicermati khususnya anggapan dari keduanya bahwa gerakan social merupakan suatu tindakan tidak terlembaga. Saya pikir telah terjadi suatu pemisahan dan keduanya melupakan bahwa ada tindakan-tindakan yang terlembaga. Sangat mustahil bila suatu gerakan kolektiv yang diorganisir walaupun longgar justru dikategorikan sebagai tindakan yang tidak terlembaga. Jelasnya tidak mungkin mengorganisir suatu kelompok tanpa dibentuk suatu lembaga. Semua kelompok yang diorganisir pasti akan memiliki sebuah lembaga organisasi. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut menjadi terlembaga. Tetapi, memang ada dalam kelompok-kelompok tersebut tindakan-tindakan yang memang tidak terlembaga seperti perlawanan sehari-hari kaum tani di Sedaka (Scott, 2000). Hasil penelitian Scott menunjukkan bahwa dalam melakukan perlawanan terhadap kelas berkuasa di Sedaka, petani Sedaka melakukan berbagai cara yang tidak terlembaga seperti mencuri kecil-kecilan, bergunjing, serta bermalas-malasan jika mereka bekerja pada orang kaya yang merupakan kelas berkuasa. Contoh di Sedaka dapat kira kategorikan sebagai tindakan tidak terlembaga. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa gerakan sosial merupakan suatu tindakan kolektiv yang tindakan tersebut dapat terlembaga maupun tidak terlembaga dengan tujuan untuk melakukan suatu perubahan yang positif.

### 3. Faktor Penyebab Gerakan Sosial

Penjelasan yang sering dikemukakan mengaitkan penyebab gerakan sosial adalah dengan depvripasi ekonomi dan sosial (Sunarto, 2000). Menurut penjelasan ini, orang melibatkan diri dalam gerakan sosial karena menderita deprivasi (kehilangan, kekurangan, penderitaan), misalnya di bidang ekonomi (seperti hilangnya peluang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya). Para penganut penjelasan ini menunjuk pada fakta bahwa gerakan sosial dalam sejarah didahului oleh deprivasi yang disebabkan oleh faktor seperti kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok. James Davies mengemukakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat meningkat terus, namun mungkin saja terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi (Sunarto, 2000). Kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan yang diinginkan masyarakat dengan apa yang diperoleh secara nyata. Kesenjangan ini dinamakan deprivasi relatif. Apabila kesenjangan relatif ini semakin melebar sehingga melewati batas toleransi masyarakat maka akan menimbulkan gejolak sosial yang dapat memicu revolusi sosial. Namun deprivasi tidak dengan sendirinya akan mengakibatkan gerakan sosial. Perubahan sosial memerlukan pengerahan sumber daya manusia maupun alam (*resource mobilization*). Tanpa adanya pengerahan sumber daya, suatu gerakan sosial tidak akan terjadi, meskipun tingkat deprivasi tinggi. Keberhasilan suatu gerakan sosial bergantung pada faktor manusia seperti kepemimpinan, organisasi dan keterlibatan, serta faktor sumber daya lain seperti dana dan sarana.

Saya sepakat bila gerakan sosial disebabkan adanya deprivasi ekonomi dan sosial. Jika dicermati kasus-kasus gerakan sosial seperti gerakan sosial Komunie Paris 1871 yang dipraktikkan oleh kaum buruh di Perancis berhasil menggulingkan para pemilik modal atau kaum borjuis. Awal dari gerakan Komunie Paris adalah adanya penindasan yang dilakukan oleh kaum pemilik modal terhadap para buruh yang menjual tenaga kerjanya. Terjadinya deprivasi di kalangan kaum buruh menyebabkan mereka harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat membebaskan mereka dari penderitaan sosial dan ekonomi. Contoh lainnya adalah terjadinya gerakan reformasi 1998 di Indonesia yang dinilai sebagai gerakan sosial yang salah satu sebabnya adalah terjadinya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi. Di tahun 1998 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Namun saat itu Pemerintahan Orde Baru yang masih dipimpin Presiden Soeharto gagal memenuhi harapan masyarakat yang diharapkan mampu menyelesaikan krisis ekonomi. Akibatnya masyarakat pun melakukan aksi-aksi perlawanan yang didahului oleh demonstrasi. Pada akhirnya rezim orde baru pun tumbang oleh gerakan sosial masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

#### 4. Jenis Gerakan Sosial

Menurut Hariyono (2007) ada tiga jenis gerakan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Gerakan Sosial Politik (*Political Social Movement*), yaitu gerakan oleh sekelompok massa untuk menentang pemerintah yang sedang berkuasa. Misalnya massa yang menentang pemerintah Orde Baru yang pembangunannya bersifat *Top Down*. Dengan tumbanganya Soeharto model pendekatan pembangunan berubah dari *Top Down* ke *Bottom Up*. Akibatnya kebijakan berubah. Perencanaan kota dan daerah bersifat sektoral. Pelibatan masyarakat terjadi. Hak-hak dikembalikan kepada masyarakat. Pemerintah menjadi berupaya keras melakukan pelayanan kepada publik.
2. Gerakan Sosial Budaya (*Social Cultural Movement*), yaitu gerakan oleh sekelompok massa untuk mengubah pola sosial budaya. Dahulu aktivitas mencoret-coret secara tidak beraturan di tempat-tempat umum yang dilakukan oleh remaja banyak terjadi dan menjadi keluhan masyarakat, penata kota dan para arsitek. Akan tetapi, dengan dikenalkannya seni grafiti, justru dianjurkan beberapa tempat umum yang memiliki media yang layak dijadikan media untuk lomba melukis dan seni grafiti.
3. Gerakan Sosial Histori (*Social History Movement*), yaitu gerakan oleh sekelompok massa untuk mendobrak struktur masyarakat yang mengabaikan bangunan yang menjadi simbol-simbol histori. Sebagai contoh rencana pemugaran pasar tradisional Johar di Semarang untuk dijadikan pasar modern oleh pemerintah kota dan investor, ditentang oleh para akademisi, arsitek dan pakar perencanaan kota, serta para budayawan setempat.

David Aberle (Sunarto, 2000) membedakan empat tipe gerakan sosial yaitu:

1. *Alterative movement*, yaitu gerakan sosial yang bertujuan mengubah sebagian perilaku perseorangan. Dalam kategori ini dapat kita masukan berbagai kampanye untuk mengubah perilaku tertentu, seperti misalnya kampanye agar orang tidak merokok.
2. *Redemptive movement*, yaitu gerakan sosial yang lebih luas daripada *alternative movement*, karena yang hendak dicapai ialah perubahan menyeluruh pada perilaku perseorangan. Gerakan ini kebanyakan terdapat di bidang agama, misalnya perseorangan diharap untuk bertobat dan mengubah cara hidupnya sesuai ajaran agama.
3. *Reformative movement*, yaitu gerakan sosial yang bertujuan merubah suatu masyarakat namun ruang lingkup yang hendak diubah hanya segi-segi tertentu masyarakatnya, misalnya gerakan kaum homoseks untuk memperoleh pengakuan terhadap gaya hidup mereka, atau gerakan kaum feminis yang memperjuangkan persamaan hak dengan laki-laki.
4. *Transformative movement*, yaitu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan kaum Khmer Merah untuk menciptakan masyarakat komunis di Kamboja. Contoh lainnya adalah gerakan *Apartheid* di Afrika Selatan.

Gerakan-gerakan sosial oleh pemerintah sering dianggap sebagai sesuatu yang perlu dihindari. Padahal gerakan sosial sebenarnya mampu melakukan kontrol suatu kebijakan kota yang sering berpengaruh produk kebijakan penataan dan pembangunan kota. Gerakan sosial sering kali dianggap anarkis oleh institusi yang sedang berkuasa. Padahal pada banyak kasus gerakan sosial dapat membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan, antara lain tentang kepentingan masyarakat yang memiliki posisi lemah dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang di kota.

### **5. Dampak Gerakan Sosial**

Menurut Zaiyardam (2002) setiap gerakan sosial mempunyai dampak yang berguna bagi suatu bangsa. Pertama, gerakan sosial mempunyai dampak psikologis yang luar biasa bagi masa pendukungnya. Terlibat dalam suatu gerakan sosial memberikan dampak psikologis dan ideologis pada perjalanan kehidupan mereka selanjutnya, yang sering sulit dipahami bagi mereka yang tidak terlibat. Bahkan gerakan sosial sendiri merupakan latihan kepemimpinan bagi mereka untuk menjadi pemimpin masyarakat. Dampak lain gerakan sosial adalah dampak politik budaya, yang wujudnya juga beragam. Gerakan sosial banyak yang mampu mempengaruhi kebijakan publik yang memihak pada rakyat, sampai mempengaruhi tumbuhnya kebudayaan atau pandangan baru atau berhasil menumbuhkan suatu nilai moral baru yang dianut oleh masyarakat.

## **F. Gerakan Sosial dalam Perspektif Konflik Marxisme**

### **1. Antonio Gramsci (1891-1937)**

#### **a. Latar Belakang Antonio Gramsci**

Gramsci merupakan pemikir politik terpenting setelah Karl Marx. Namun sayangnya, justru pikiran Gramsci yang ramai diperbincangkan dunia terutama di era 60an-70an, justru di Indonesia terjadi sebaliknya. Saat rezim Orde Baru berkuasa dan beritikad buruk dan kejam terhadap segala jenis ‘penyimpangan ideologi’ yang dilakukan rakyatnya, adalah saat di mana pikiran-pikiran Gramsci tidak bisa disuarakan (Arif, 2003). Gramsci lahir di Ales, Sardinia, Italia, 22 Januari 1891. Anak keempat dari ketujuh bersaudara ini, pada awalnya, berasal dari sebuah keluarga yang tidak terlalu miskin, meski berasal dari kelas bawah. Pada tahun 1911, Gramsci memasuki perguruan tinggi setelah memenangkan perolehan beasiswa Universitas di Turin Italia. Pada tahun-tahun itulah, Gramsci membentuk karakter intelektualnya. Sejak menjadi mahasiswa Gramsci telah aktif menjadi seorang yang mempunyai komitmen untuk melakukan sebuah gerakan sosial, saat masih kuliah dia juga menjadi pemimpin mingguan kelompok sosialis ternama *Ordine Nuovo*. Sebagai seorang politikus, karier Gramsci sangat cemerlang, dalam tempo yang relatif singkat dia menempati posisi strategis Partai Komunis Sosialis Italia.

Tetapi situasi pada saat itu adalah situasi di mana otoritarianisme Benito Mussolini (1883-1945) memerintah. Mussolini adalah seorang sosialis revolusioner yang keluar dari partainya pada permulaan Perang Dunia I. Alasan Mussolini keluar adalah karena partainya (Partai Sosialis) tidak mau ikut berperang, Sedangkan Mussolini menghendaki agar Italia ikut terlibat dan berpihak pada sekutu. Pascaperang, Mussolini yang berpangkat kopral itu membentuk kelompok tempur untuk melindungi para veteran perang. Ideologi fasis atau fasisme yang dibawa Mussolini, dengan cepat menyebar di seluruh penjuru Italia bahkan ideologi tersebut mempengaruhi situasi politik Italia masa itu.

#### **b. Munculnya Hegemoni Gramsci**

Pada bulan Oktober 1922, Mussolini ditunjuk sebagai Perdana Menteri dalam sebuah kudeta. Tahun 1928, pemerintah konstitusional dibubarkan, dan berlangsung hingga 15 tahun kemudian (Hagopian, 1985 dan Andi, 1999 dalam Arif, 2003). Sementara itu pada tahun 1924, Gramsci diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Italia. Tetapi pada tahun 1926, rezim Mussolini menangkap tokoh-tokoh dari kaum Kiri. Saat itulah, 20 November 1926, setelah dua tahun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Italia, Antonio Gramsci ditangkap dan dipenjarakan selama 20 tahun 4 bulan 15 hari. Dalam penjara, Gramsci menerjemahkan sejumlah karya Marx, menelusuri karya-karya Lenin dan tulisan-tulisan lain yang diselundupkan koleganya ke penjara. Dari sinilah dapat dipahami bahwa Gramsci adalah peminat Marx. Karya-karya Marx yang menjadi doktrin komunisme yang radikal di Rusia dan Eropa Timur, dipahaminya



sebagai sesuatu yang tidak relevan lagi. Alternatif radikalisme yang tumbuh tidak menemui kemiripan dengan apa yang semestinya terjadi di Italia. Sebagai seorang Marxis, Gramsci menerjemahkannya menjadi halus, yang pada gilirannya kemudian dikenal sebagai teori hegemoni; dengan membedah konsep negara dan masyarakat.

Pikiran pertama yang ditulisnya semasa dipenjara adalah tentang peran intelektual, yang kemudian hari *trend* disebut sebagai intelektual organik (*organic intellectuals*) (Arif, 2003). Gramsci mendeskripsikan betapa pentingnya peran kaum intelektual dalam transformasi sosial. Seorang intelektual organik adalah seorang yang tidak hanya memahami teori sebagai teori yang terlepas dari realitas sosial, namun, intelektual organik adalah intelektual yang memanifestasikan potensi perubahannya dalam realitas sesungguhnya, saat berhadapan-hadapan dengan kekuasaan yang mendominasi. Intelektual ini diharapkan sedemikian rupa untuk menjadi *counter hegemoni* yang dilakukan oleh negara atau kelas dominan, dalam rangka membela rakyat atau kelas yang tertindas. Banyak penganut Marx menafsirkan Marxisme sebagai dogma dan doktrin revolusi. Sementara memaknai revolusi merupakan pekerjaan menunggu datangnya konflik inheren dari sang musuh, kapitalisme. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa teori tentang hegemoni adalah langkah maju yang dirumuskan Gramsci untuk menghadapi kelas dominan yang dipresentasikan oleh kaum pemilik modal. Bagi Gramsci, realitas sosial yang ditunjukkan dengan adanya karakter kapitalistik yang eksploitatif pun demikian juga dengan otoritarianisem rezim politik Benito Mussolini, ternyata tidak kunjung memunculkan revolusi sosial seperti yang dianggarkan oleh Marxisme klasik. Bahkan pada titik kulminasi, justru yang muncul adalah gejala diamnya

para pelaku revolusi (kaum proletar). Mereka didiamkan oleh seperangkat kepentingan politik yang hegemonik, yang diselundupkan pada massa rakyat tertindas. Lebih ironis, massa buruh yang ada cenderung menjadi kelompok sosial yang “tabah akan penderitaan”, di mana asumsi yang muncul adalah bahwa kekuasaan yang hadir akan selalu menindas. Fatalisme kaum proletar ini terjadi sekian lama, setelah rezim kapitalisme muncul dengan segenap kekuasaan kapitalnya. Tidak hanya rezim kapital, tapi juga, kelas bawah tidak segera berontak meski yang terjadi adalah sebuah kekejaman.

Jelaslah bahwa teori hegemoni yang dimaksud Gramsci menunjuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan, dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelas yang dipimpin dalam karakter konsensual. Konsensus yang terjadi antara dua kelas ini bisa diciptakan melalui cara pemaksaan maupun pengaruh secara terselubung lewat pengetahuan yang disebarkan melalui perangkat-perangkat kekuasaan. Sementara, dalam marxisme, konsep hegemoni untuk pertama kalinya dilansir di Rusia pada tahun 1880, oleh seorang Marxis Rusia yang lain, Plekhanov. Konsep ini dibangun sebagai bagian dari strategi untuk meruntuhkan pemerintahan Tsar. Hegemoni dalam definisi ini mengacu pada kepemimpinan *hegemonic proletariat* serta perwakilan-perwakilan politik mereka dalam aliansinya dengan kelompok lain, seperti kaum borjuis yang kritis, petani dan kaum intelektual.

Konsep hegemoni Gramsci bisa dilacak melalui penjelasannya tentang supremasi kelas. Menurut Gramsci, "supremasi sebuah kelompok untuk mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai "dominasi" dan sebagai "kepemimpinan intelektual". Dan di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk menghancurkan atau menundukan mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Sedangkan di pihak lain, kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan suku mereka. Hegemoni terjadi manakala satu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya dalam pengertian bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni diraih secara politis dan melalui upaya-upaya kultural dan intelektual untuk menciptakan uniformitas pandangan dalam sebuah masyarakat. Dengan demikian, kelompok penguasa harus bisa memastikan bahwa pandangan yang disebarkan merupakan pandangan universal yang mau tidak mau mesti bisa mengakomodasikan kelompok-kelompok lain di luar penguasa. Sehingga kesatuan moral dan intelektual inilah yang selanjutnya mampu memberikan status hegemonik pada kelas penguasa.

Kelas ini mempertahankan kepentingannya di hadapan kelas lain yang syarat dihegemoni. Sehingga hegemoni ini lebih mensyaratkan konstelasi politik kekuatan sosial-politik lain yang kemudian disebut sebagai blok historis. Suatu perpaduan dari berbagai kekuatan sosial politik atau kelas-kelas yang ada, yang diintegrasikan secara, tidak hanya ekonomis tetapi politis dan ideologis oleh perangkat ide-ide hegemonik.

Ketika rezim fasis telah menancapkan hegemoni kepada kelompok masyarakat di Italia untuk melanggengkan kekuasaannya. Meski untuk itu harus dengan melakukan tindakan-tindakan anarkis maupun persuasif. Bagi Gramsci hegemoni tidak dilakukan dengan tindakan tersebut, tetapi proses emansipasi dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Partisipasi semua elemen masyarakat dalam aktivitas sangat dibutuhkan dalam proses hegemoni.

Pengertian hegemoni sendiri merujuk pada suatu keadaan di mana mereka yang sedang berkuasa, bisa dalam bentuk negara, kaum pemilik modal, ataupun kelas elit lainnya, berhasil memobilisasi persetujuan umum atas suatu nilai (sering kali disebut sebagai ideologi) yang dipromosikan sebagai ukuran kepatutan. Hegemoni dengan demikian adalah penjelasan rasional dari apa yang sering disebut sebagai kesadaran semu atau mistifikasi; sebuah alasan mengapa kontradiksi materi di kalangan masyarakat kapitalis tidak mampu membangkitkan perjuangan kelas (Santoso, 2004). Dalam hegemoni, masyarakat dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, hinggapada akhirnya menganggap apa yang ada sebagai sebuah keniscayaan. Gagasan sentralnya adalah bagaimana kelas yang berkuasa mendominasi, tidak hanya alat produksi dalam konteks material, akan tetapi termasuk alat produksi simbolis. Melalui berbagai macam institusi seperti pendidikan, agama, kebudayaan, dan termasuk di dalamnya norma. Kelas yang berkuasa berusaha mengendalikan ideologi masyarakat semata-mata demi kepentingan kekuasaannya.

Menurut Gramsci hegemoni adalah kemampuan untuk mengakomodasikan semua kepentingan kelompok lain sehingga mereka mau memberikan dukungan serta partisipasi (Arif, 2003). Dengan jalan inilah sebenarnya kekuasaan dapat dicapai dan dipertahankan.

Masih menurut Gramsci, hegemoni merupakan konsensus, di mana kepentingan semua kelompok terwadahi oleh kelompok yang berkuasa, serta diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat serta kemampuan yang dimiliki sehingga kelompok yang berkuasa mampu menjaga keberlangsungan kekuasaan dalam batas waktu tak terhingga, serta mendapat dukungan dari kelompok lain (Arif, 2003). Dari sinilah hegemoni kemudian menimbulkan interpretasi yaitu sebagai wacana tandingan untuk melakukan perlawanan sebagai upaya pembebasan kelompok tertindas.

### **c. *Counter Hegemoni***

Ketika hegemoni sudah sedemikian parah dilakukan oleh rezim berkuasa, maka harus dilakukan aktivitas untuk meng-*counter* hegemoni dari kelompok berkuasa. Sebab inilah jalan untuk melakukan perjuangan pembebasan rakyat. Untuk itulah perlu dilakukan pendidikan politik bagi rakyat agar tercipta kesadaran kolektif dan rakyat. Aktivitas-aktivitas tersebut tentu membutuhkan intelektual yang mampu untuk memberikan pendidikan partisipatoris sebagai alat untuk gerakan kesadaran tersebut. Gramsci membedakan intelektual menjadi dua tipologi yaitu intelektual tradisional, merupakan intelektual yang belum meluas dan digerakan karena proses produksi. Sedangkan tipologi yang kedua adalah intelektual organik yang memiliki kemampuan sebagai organisator politik yang menyadari identitas dari yang

diwakili dan mewakili. Perbedaan kelompok intelektual (tradisional dan organik) tersebut lebih disebabkan karena terjadi pereduksian makna intelektual. Intelektual tradisional berkuat pada persoalan yang bersifat otonom dan independen serta digerakan oleh faktor-faktor produksi. Artinya bahwa mereka melakukan aktivitas intelektual tersebut kurang lebih karena faktor ekonomi. Sementara intelektual organik adalah mereka yang mempunyai kemampuan sebagai seorang organiser. Intelektual organik mempunyai kemampuan mengorganisasi massa (Arif, 2003).

Penindasan dan pengeksploitasian terhadap rakyat tidak boleh terus berlangsung. Karena itu, intelektual organik memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat. Transformasi wacana dari intelektual organik yang memiliki kemampuan untuk mengorganisir serta profesionalisme untuk membentuk organiser baru, sekaligus juga sebagai bentuk *counter* hegemoni penguasa.

Seorang intelektual organik adalah seorang yang tidak hanya memahami teori sebagai teori yang terlepas dari realitas sosial, namun, intelektual organik adalah intelektual yang memanifestasikan potensi perubahannya dalam realitas sesungguhnya, saat berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang mendominasi. Intelektual ini diharapkan sedemikian rupa untuk menjadi *counter* hegemoni yang dilakukan oleh negara atau kelas dominan, dalam rangka membela rakyat atau kelas yang tertindas (Arif, 2003). Perbedaan kelompok intelektual tersebut bisa jadi karena krisis yang terjadi di Italia waktu itu. Tetapi perlu dicermati pula bahwa perbedaan intelektual tersebut secara lebih kritis terutama dalam frame politik. Artinya, yaitu perbedaan tersebut bisa jadi asumsi sebagai sebuah upaya

untuk melakukan doktrinisasi. Asumsi dasar intelektual tradisional adalah karena tradisi, budaya atau sistem sosial dalam masyarakat. Kelompok tradisional bisa dikatakan secara langsung mereka adalah kelompok petani, buruh dan para profesional.

Mereka membutuhkan wacana tandingan, karena mereka selama ini juga berada dalam subordinasi yang tertindas dan tereksplorasi. Dengan memberikan pengakuan bahwa mereka mempunyai potensi untuk berkembang dan karena itulah mereka harus memperoleh pendidikan untuk membangun kesadaran bahwa selama ini telah terhegemoni dan ditindas oleh rezim berkuasa. *Counter* hegemoni kekuasaan tersebut dapat menjadi bentuk hegemoni baru atas kelompok intelektual tradisional dan intelektual organik.

## **G. Penelitian Terdahulu**

### **1. Analisis Organisasi Perempuan Dalam Pembentukan Sebuah Gerakan (Studi Pada Basis Mitra Kerja Jaringan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Tahun 2009) Oleh Melsi Ganavia Ekawati**

Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisis terhadap organisasi perempuan dalam membentuk sebuah gerakan sosial. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan bahwa kaum perempuan melakukan sebuah gerakan, yaitu karena adanya berbagai masalah atau ketimpangan gender yang menimpa kaum perempuan, di antaranya masalah pendidikan, politik, kemiskinan dan hukum. Masalah-masalah tersebut menuntut kaum perempuan harus berjuang untuk menyelesaikan masalah-masalah ketimpangan gender. Penelitian ini lebih berfokus kepada analisis organisasi dalam membentuk sebuah gerakan.

Dari hasil penelitian tersebut di dapat kesimpulan bahwa:

1. Alasan perempuan untuk mengikuti organisasi perempuan yaitu karena berasal dari kondisi yang dialami oleh perempuan itu sendiri, misalnya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, menambah teman serta wawasan yang berkaitan dengan masalah perempuan. Selain itu, alasan untuk memperbaiki kondisi kehidupan perempuan yang selama ini selalu dinomorduakan, menjadi alasan mereka untuk bergabung dalam organisasi.
2. Strategi yang dilakukan oleh lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dalam melakukan sebuah gerakan antara lain melakukan advokasi, melakukan pendidikan secara bertahap, melakukan perluasan wilayah, melaksanakan isu strategis dengan terencana dan terprogram.
3. Penghambat organisasi perempuan dalam melakukan gerakan sosial adalah minimnya logistik yang dimiliki, proses korelasi yang berjalan tidak optimal, isu yang diangkat tidak berdasarkan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Sehingga program kurang terarah, sedangkan hambatan untuk perempuan itu sendiri adalah adanya anggapan masyarakat yang menganggap bahwa perempuan yang ikut dalam suatu organisasi adalah hal yang sia-sia.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Saudari Melsi Ganavia Ekawati lebih berfokus kepada studi analisis organisasi, maka hasil dari penelitian tersebut seputar adalah mengenai hambatan-hambatan organisasi Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, baik itu hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi itu sendiri.



Perbedaan penelitian Saya dengan penelitian Melsi Ganavia Ekawati adalah terletak pada objek yang diteliti beserta dengan fokus penelitian. Penelitian saya dilakukan terhadap pedagang kaki lima dengan fokus penelitian untuk mengetahui dan memahami gerakan sosial pedagang kaki lima dalam perspektif konflik marxisme dan untuk melihat kecenderungan *power* dan *powerless* diantara negara, *local government* (Pemerintah Kota Bandar Lampung) dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sedangkan fokus penelitian Melsi Ganavia Ekawati lebih kepada analisis organisasi perempuan dalam membentuk sebuah gerakan.

## **2. Reaksi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung (Studi di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung Tahun 2006) Oleh Tristian Ari Wibowo**

Penelitian ini berfokus pada analisis daripada reaksi pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pasar Bambu Kuning terhadap rencana relokasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pedagang kaki lima akan direlokasi ke dalam Pasar Bambu Kuning yang berada di lantai satu, dua dan tiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima menolak adanya relokasi karena dinilai fasilitas yang tersedia belum mendukung usaha pedagang kaki lima, selain itu harga sewa tempat masih terlalu tinggi untuk ukuran pedagang kaki lima.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Tristian Ari Wibowo terletak pada fokus kajian penelitian. Tristian Ari Wibowo berfokus pada reaksi pedagang kaki lima terhadap kebijakan relokasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih fokus untuk mengetahui dan memahami gerakan sosial pedagang kaki lima dalam perspektif

konflik marxisme dan untuk melihat kecenderungan *power* dan *powerless* diantara negara, *local government* (Pemerintah Kota Bandar Lampung) dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

### **3. Dampak Kebijakan Pemindahan Pedagang Kaki Lima Terhadap Ketertiban Umum (Studi di Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang Bandar Lampung Tahun 2006) Oleh Reny Maya Sari P.N**

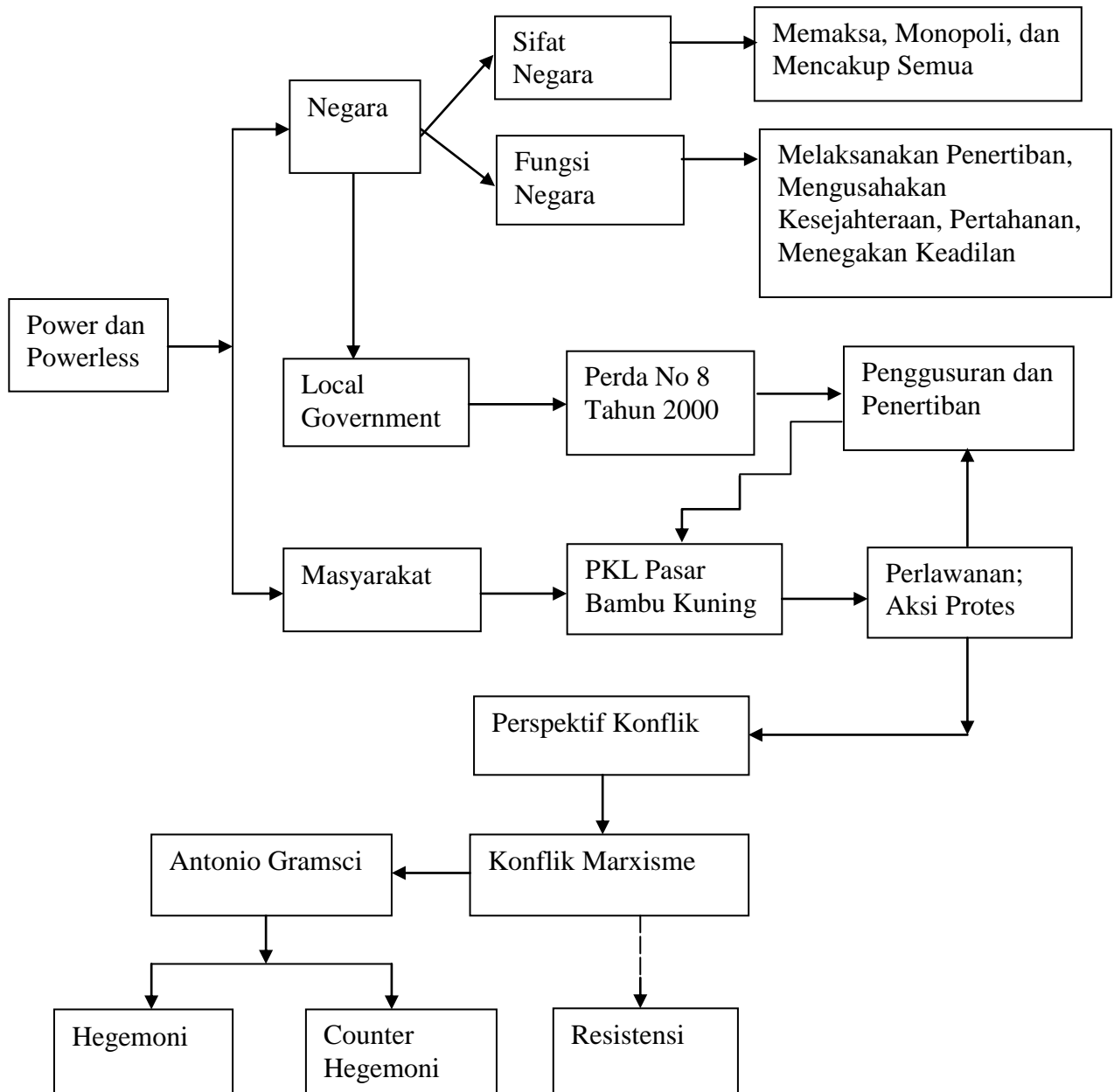
Penelitian yang dilakukan oleh Reny Maya Sari P.N berfokus pada dampak kebijakan pemindahan pedagang kaki lima terhadap ketertiban umum di Pasar Bambu Kuning. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa:

1. Kebersihan pasar: disimpulkan bahwa kondisi kebersihan Pasar Bambu Kuning setelah kebijakan pemindahan pedagang kaki lima belum mengalami perubahan karena masih banyak ditemui sampah-sampah yang berserakan.
2. Keteraturan lahan parker: disimpulkan bahwa kebijakan pemindahan pedagang kaki lima ke lantai dua Bambu Kuning Plaza hanya memberikan sedikit kontribusi bagi keteraturan lahan parker yang mana lengangnya pintu masuk utara dan selatan Pasar Bambu Kuning dapat dipergunakan bagi parker kendaraan dan adanya retribusi parker yang sesuai ketentuan. Kendati demikian masih dipergunakannya lahan parker bagi kegiatan berdagang dan terdapatnya parker liar di area pasar menyebabkan kegiatan perparkiran berjalan kurang tertiba.
3. Keapikan dan keindahan: dapat disimpulkan bahwa kondisi keapikan dan keindahan Pasar Bambu Kuning belum apik jika dilihat dari bangunan los, kios dan amparan yang dibangun di atas trotoar dan lahan parker dan kenyamanan para pengunjung berada di dalam pasar yang belum tercipta sejak

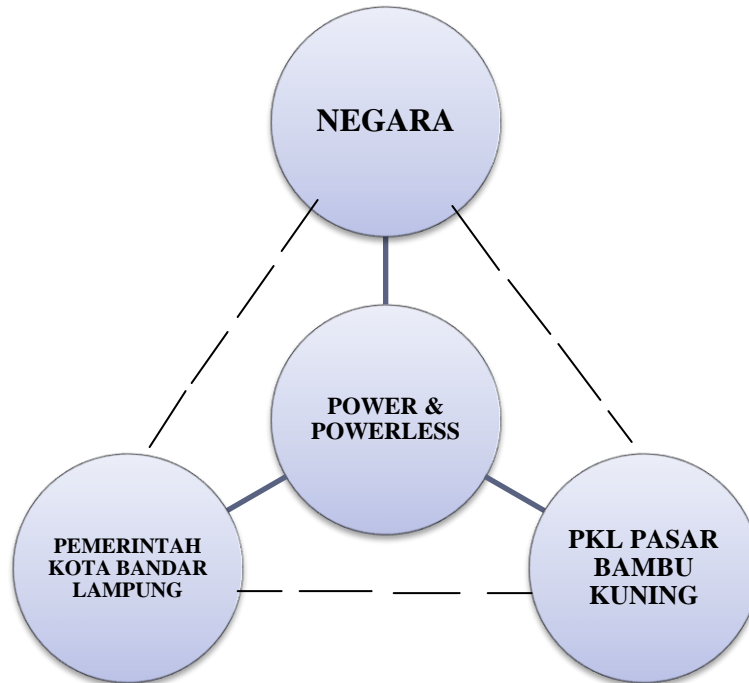
dipindahkannya pedagang kaki lima, kendati kondisi pintu masuk sebelah utara dan selatan Pasar Bambu Kuning sudah terlihat apik.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Reny Maya Sari P.N dengan penelitian saya terletak pada focus penelitian. Penelitian Reny Maya Sari P.N berfokus kepada tiga hal yaitu kebersihan pasar, keteraturan lahan parker, serta keapikan dan keindahan pasar. Sedangkan penelitian saya berfokus kepada gerakan social serta resistensi dari pedagang kaki lima terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang pendekatan studinya memakai pendekatan perspektif konflik marxisme.

Gambar 14. Skema Kerangka Pikir



**Gambar 15. Kerangka Teoritis**



Dari gambar kerangka teoritis di atas dapat dijelaskan bahwa *power and powerless* yang berada di tengah-tengah antara Negara, Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning menandakan bahwa ketiga pihak tersebut mempunyai kekuasaan. Sehingga *power and powerless* tersebut menyebar di antara tiga pihak tersebut yang ditandai oleh garis lurus. Sedangkan garis putus-putus yang menyambungkan antara Negara, Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning menandakan bahwa diantara ketiga pihak tersebut terjadi suatu hubungan kekuasaan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu kepada strategi penelitian, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan sebagainya yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi mengenai masalah sosial empiris yang hendak dipecahkan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti mendekati data sehingga konseptual dan kategoris dari data itu sendiri, dan bukannya dari teknik-teknik yang dikonsepsikan sebelumnya, tersusun secara kaku, dan dikuantifikasi secara tinggi yang memasukkannya saja dunia sosial empiris ke dalam definisi operasional yang telah disusun peneliti (Filstead, 1970 dalam Chadwick dkk, 1991).

Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat menelaah informasi lebih dalam untuk mengetahui hasil penelitian. Pendekatan kualitatif dapat dilihat sebagai sebuah cara melihat dan mengkaji gejala-gejala sosial dan kemanusiaan yaitu dengan memahaminya, dengan cara membangun suatu gambaran yang utuh atau *holistic* yang kompleks, di mana gejala-gejala yang tercakup dalam kajiannya itu di lihat sebagai saling terkait satu dengan yang lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional sebagai sebuah sistem.

Dalam penelitian ini ada beberapa hambatan yang peneliti rasakan yaitu diawal penelitian khususnya saat mengajukan usul penelitian hambatan utamanya adalah peneliti belum maksimal menguasai beberapa teori-teori yang terkait dengan gerakan sosial dan hegemoni sehingga sewaktu berada di lapangan peneliti kurang sensitif dan kritis mengenali gejala-gejala yang berkaitan dengan pedagang kaki lima. Selanjutnya, sewaktu turun lapangan atau berada di tempat penelitian sempat terjadi kesenggangan antara peneliti dan informan sehingga perlu waktu beberapa bulan untuk mendekati diri dengan informan. Hal ini tentu semakin memakan waktu penelitian. Hambatan yang selanjutnya yaitu terlalu banyak data-data yang diperoleh ternyata semakin menyulitkan peneliti untuk melakukan pemilahan informasi yang yang terkait dengan pedagang kaki lima.

### **B. *Setting* Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian ini dipilih karena jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning berjumlah  $\pm$  600 pedagang. Jumlah PKL ini merupakan jumlah terbesar yang ada di Kota Bandar Lampung khususnya di Pasar Bambu Kuning. Dalam penelitian ini, posisi PKL merupakan subjek yang melakukan gerakan sosial. PKL adalah bagian dari masyarakat kota yang berprofesi sebagai pedagang dengan modal yang kecil. PKL adalah bagian dari kelas yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku kelas penguasa. Banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning merupakan sumber kekuatan utama dalam membentuk suatu gerakan sosial atau gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung.

### **C. Penentuan Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik-teknik tertentu yang tujuannya adalah menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan menggali informasi yang menjadi dasar penulisan laporan. Dalam penelitian ini informan berjumlah empat orang. Keempat orang informan ini peneliti anggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pedagang kaki lima dalam melakukan berbagai perlawanan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari beragam jenis, bisa berupa manusia, peristiwa dan tempat atau lokasi, benda, serta dokumen atau arsip. Beragam sumber data tersebut menuntut cara atau teknik pengumpulan data tertentu yang sesuai dengan sumber datanya guna mendapatkan data yang diperlukan untuk bisa menjawab permasalahannya. Berbagai strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu metode yang bersifat interaktif dan noninteraktif (Goetz dan LeCompte, 1984 dalam Sutopo, 2006).



Pada pelaksanaan penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpul data yang satu dengan yang lainnya berfungsi saling melengkapi mengenai data yang dibutuhkan. Secara jelas teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi berperan (*participant observation*)

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan disengaja untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti guna memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Dengan teknik ini juga dihimpun data tentang gejala-gejala sosial yang mengungkap adanya pola gerakan sosial pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning. Observasi partisipatif dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan, yaitu; *pertama*, agar tidak terjadi kesenjangan antara peneliti dengan informan, *kedua*; dengan observasi partisipatif akan terjalin hubungan yang erat (*rappot*) sehingga terjadi hubungan komunikasi yang dekat dengan informan dan lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan, *ketiga*; dapat memperoleh informasi lebih dalam dan rinci dari permasalahan yang dialami oleh para pedagang kaki lima khususnya mengenai akibat-akibat dari adanya penertiban di mana akibat ini mendorong dan memotivasi para pedagang kaki lima Pasar Bambu Kuning melakukan berbagai gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## 2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data diperlukan wawancara, yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Teknik wawancara ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampu, dan memperoyeksikan hal-hal itu yang dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang (Sutopo, 2006).

Wawancara di dalam penelitian kualitatif pada umumnya tidak dilakukan secara terstruktur ketat dan dengan pertanyaan tertutup, tetapi dilakukan secara tidak terstruktur sebagai teknik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu mengenai apa yang terjadi sebenarnya dan ingin menggali informasinya secara mendalam dan lengkap dari narasumbernya. Dengan demikian wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended*), dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang

sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh, lengkap dan mendalam.

Berikut adalah pendapat Benney dan Hughes (1956, 137) dalam Bruce A. Chadmick, dkk (1991) tentang wawancara:

”wawancara dianggap sepadan dengan metodologi sosial: Sosiologi telah menjadi ilmu wawancara...Beberapa cabang kajian sosial dibedakan satu sama lain bukan oleh logika melainkan oleh kecenderungan terhadap jenis data dari instrumen tertentu dalam penggaliannya...Sosiologi telah menjadi pengkaji insan yang hidup. Tentu saja beberapa sosiolog masih mengkaji dokumen. Beberapa lainnya mengamati masyarakat secara langsung, sedangkan lainnya lagi melakukan percobaan terhadap mereka dan mengamatinya secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Walaupun demikian secara luas sosiolog dari Negara-negara lain, telah menjadi pewawancara merupakan alatnya, dan karya-karya membawa capnya”

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi yang sifatnya sangat pribadi yang menuntut *interviewer* mampu untuk melakukan probing dalam mendapatkan informasi. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti akan terarah, tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan, serta suasana tetap dijaga agar kesan dialogis dan informal nampak. Wawancara mendalam dilakukan beberapa kali kepada setiap informan dengan maksud agar didapat gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian. Dalam hal ini, wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui bagaimana gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan tertulis yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen yang dianggap penting yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti. Teknik kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya koran-koran, majalah-majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat:1985). Teknik ini peneliti lakukan untuk menjaring data-data tentang gerakan sosial pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Dalam proses analisis kualitatif, terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Tiga komponen utama analisis tersebut adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan serta verifikasi (Miles dan Huberman, 1984 dalam Sutopo, 2006). Tiga komponen tersebut berarti harus ada, dan selalu terlibat dalam proses analisis, saling berkaitan, serta menentukan arah isi dan simpulan, baik yang bersifat sementara maupun simpulan akhir sebagai hasil analisis akhir. Tiga komponen analisis tersebut selalu dikomparasikan secara teliti bagi pemantapan pemahaman dan juga kelengkapannya. Analisa data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2000) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

## 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan (*fieldnote*) (Sutopo, 2006). Miles dan Huberman mengemukakan, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Suprayogo dan Tobroni, 2001). Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya bisa dinyatakan sudah diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Artinya reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian yang menekankan pada fokus tertentu, tentang kerangka kerja konseptual, dan bahkan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan karena teknik pengumpulan data tergantung pada jenis data yang akan digali, dan jenis data ini sudah terarah dan ditentukan oleh beragam pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitiannya.

Memperhatikan penjelasan singkat di atas, maka bisa dinyatakan bahwa reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dan simpulan-simpulan dari unit-unit permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian dapat dilakukan.

## 2. Sajian Data

Sebagai komponen analisis kedua, sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan (Sutopo, 2006). Miles dan Huberman mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Suprayogo dan Tobroni, 2001). Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasan peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa mudah dipahami. Sajian data merupakan narasi mengenai berbagai hal yang terjadi atau ditemukan di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan atas pemahamannya tersebut. Sajian data ini unit-unitnya harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci dan mendalam untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel pendukung narasinya. Semuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dapat lebih dimengerti dalam bentuknya yang

lebih kompak. Kedalaman dan kemantapan hasil analisis sangat ditentukan oleh kelengkapan sajian datanya.

### 3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dan berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis. Konklusi-konklusi dibiarkan tetap di situ, yang pada waktu awalnya mungkin agak kurang jelas, kemudian secara berkelanjutan semakin meningkat secara eksplisit, dan juga memiliki landasan data yang semakin kuat. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data sudah berakhir.

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan verifikasi yang merupakan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian. Verifikasi bahkan juga dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas, yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya.